

DAMPAK PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI MELALUI
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) BAGI ANGGOTA KOPERASI
(Studi Kasus di Kabupaten Brebes)

Riana Panggabean*)

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana dampak program P3KUM terhadap, anggota Koperasi dan masyarakat. Di Kabupaten Brebes dampak atau manfaat dana P3KUM sangat dirasakan oleh anggota antara lain untuk meningkatkan volume usaha, omset, menghemat ongkos/transportasi, membantu perawatan kesehatan bagi keluarga dan memperbaiki MCK di keluarga. Manfaat lain yang juga dirasakan anggota adalah adanya rasa keinginan berkumpul pada saat RAT dan pada saat membayar pinjaman untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk menambah ide-ide baru dan sebagainya. Dalam proses berkoperasi, meminjam dan membayar terjadi proses belajar nonformal bagi anggota koperasi. Artinya jika Koperasi itu berfungsi secara baik di dalamnya ada sistem yang sudah berjalan secara otomatis untuk membangun kebersamaan. Oleh sebab itu program P3KUM perlu dilanjutkan agar berkesinambungan dan manfaatnya dapat dirasakan anggota.

*P3KUM, dampak, manfaat, volume usaha, omzet anggota,
peningkatan kesehatan keluarga*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa alasan mengapa UMKM perlu diberdayakan. Alasan pertama adalah karena masih banyak atau sekurang-kurangnya 92 % UMKM belum akses dengan sumber permodalan. *Fakta di lapangan menjelaskan bahwa (1) Bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia. (2) jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 2.41 trilyun atau sebesar Rp 227,7 juta per koperasi dinilai belum menjangkau UMKM (3) jumlah*

*) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 2000-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 347,5 milyar atau sebesar Rp 24,7 juta per unit lembaga non koperasi juga masih belum memadai untuk memberdayakan UMKM yang ada.

Alasan kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS (2006), jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa.

Alasan ketiga jika UMKM diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi usaha menengah dan alasan keempat. menurut hasil penelitian (Syukur, 2002) umumnya usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat per- bulan rata-rata 87, 34 % dan alasan yang kelima faktor pendanaan menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil dan bahkan bukannya tidak mungkin untuk terus ke usaha menengah. Usaha mikro mempunyai potensi untuk dikembangkan secara cepat.

Selain keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan permodalan, UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam pemasaran, kompetensi berusaha yang masih lemah dan kurang memiliki jejaring usaha baik antar UMKM dan pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya. Karena perkembangan usaha sangat terkait dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi faktor ini juga menjadi faktor penentu untuk berkembangnya suatu usaha. Jika hanya faktor modal yang diatasi sedangkan faktor lain ditinggalkan maka modal tersebut akan kurang bermanfaat bagi UMKM.

Oleh sebab itu salah satu program yang dikembangkan Pemerintah untuk menjangkau UMKM yang masih lemah tersebut disebut P3KUM. P3KUM adalah rangkaian kegiatan Pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP).

Program P3KUM dimulai tahun 2006 namun belum diketahui sejauhmana dampak program tersebut bagi anggota koperasi penerima program P3KUM . Kajian ini menjelaskan adanya dampak P3KUM terhadap anggota baik untuk meningkatkan volume usaha, omzet penjualan dan adanya kebersamaan bagi anggota untuk berbagi pengalaman.

1.2. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana dampak program P3KUM terhadap anggota koperasi dan masyarakat.

1.3. Manfaat Kajian

Manfaat kajian ini adalah sebagai bahan masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan di masa datang.

II. KERANGKA BERPIKIR

Kajian ini merupakan bagian dari kajian Dampak Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bagi Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2007. Bagian ini mengambil kasus Dampak Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Tujuan umum pemberdayaan koperasi dan UKM adalah (1) meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya, (2) mengurangi pengangguran dan (3) mengurangi kemiskinan.

Kesejahteraan anggota dan masyarakat akan dicapai jika kebutuhan-kebutuhan anggota dan masyarakat dapat terpenuhi pada tingkat yang lebih baik. Pada dasarnya kebutuhan anggota dan masyarakat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) kebutuhan fisik (material) dan (2) kebutuhan rohani (kejiwaan). Hal ini disebut membangun manusia seutuhnya, di mana kebutuhan fisik terpenuhi demikian juga kebutuhan rohani. Kedua kebutuhan ini harus seimbang supaya terdapat kesejahteraan dan kebahagiaan (M Hasibuan, 1987).

Tujuan butir 2 dan 3, diasumsikan dapat dicapai bersamaan dengan pencapaian tujuan pertama dan dalam proses dapat dipenuhi melalui adanya kesempatan kerja. Kesejahteraan anggota dan masyarakat adalah tujuan jangka panjang yang dilakukan melalui perencanaan pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah "Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009) sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan dijabarkan ke dalam program-program yang merupakan strategi implementasi pada tataran makro, meso dan mikro serta dikelompokkan ke dalam 5 program yaitu: (1) Penciptaan iklim usaha bagi UMKM, (2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, (3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komparatif UKM (4) Program usaha skala mikro dan (5) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Program-program tersebut akan dicapai melalui proses dan waktu yang panjang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan KUKM tersebut dilakukan melalui program-program pemberdayaan sebagai tujuan antara. Tujuan-tujuan antara ini perlu

diukur dampaknya sebelum tujuan jangka menengah dan panjang dapat dicapai. Tujuan antara ini adalah sasaran antara untuk pencapaian tujuan keberhasilan pemberdayaan KUKM yang akan mengarah kepada tujuan meso dan jangka panjang. Oleh sebab itu diperlukan indikator yang menggambarkan dampak program pada jangka pendek dan menengah. Dampak yang mungkin dicapai adalah manfaat program terhadap anggota maupun masyarakat sebagai akumulasi dari keberhasilan program pemberdayaan KUKM.

Tujuan-tujuan antara dalam Renstra Kementerian Negara KUKM antara lain adalah melaksanakan Program P3KUM yang menjadi pengamatan dalam kajian ini. P3KUM pola konvensional menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional No 09/Per/M.KUKM/VI/2006 Pola Konvensional adalah rangkaian kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dengan menggunakan pola dana bergulir termasuk di dalamnya koperasi yang dikelola dan melayani anggota para wanita pengusaha mikro Program Pembiayaan Pembiayaan Lembaga Produktif Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Pola Konvensional.

Tujuan program adalah memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan, serta memperkuat peran dan posisi KSP/USP termasuk koperasi yang dikelola oleh wanita dan melayani para wanita pengusaha sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Pola konvensional adalah bentuk pengembangan permodalan koperasi dan usaha kecil melalui peningkatan peranan fungsi KSP/USP koperasi dengan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000.

Mengingat keterbatasan yang dihadapi dalam kajian ini sesuai judul kajian maka variabel dan indikator dampak P3KUM yang diamati dibatasi kepada variabel manfaat sedangkan indikator kajian adalah volume usaha, dan penyesuaian dengan kehidupan riil di lapangan.

III. METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini dilakukan dengan metode survey dengan studi kasus yaitu suatu kajian yang mengambil sampel dari suatu populasi (Singarimbun, 1998). Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan metode survey, data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data Sekunder di ambil dari instansi terkait dan hasil kajian. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota responden. **Teknik penetapan sampel dilakukan melalui metode purposive dengan ciri di kabupaten bersangkutan ada koperasi yang mendapat program pembiayaan produktif (P3KUM). Lokasi kajian yang dipilih adalah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan jumlah responden 4 koperasi meliputi: 1) KSU “Tegar”, Bumiayu; 2) Koperasi Petani Pemakai Air “Dharma Tirta Sejahtera”, Paguyangan; 3) Koperasi “Mayar” Paguyangan; 4) KUD “Bhakti”, Tanjung. Teknik Analisis Data** yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metoda kualitatif dan mendiskripsikan pendapat anggota tentang manfaat dana bergulir P3KUM.

IV. KONDISI PERKOPERASIAN KABUPATEN BREBES

Menurut Kajian Dampak Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bagi Kesejahteraan Masyarakat, 2007, Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki 17 kecamatan yang tersebar pada 1.661,17 km². sebanyak 5 kecamatan terdapat di daerah pantai, 9 kecamatan di dataran rendah dan 3 kecamatan di dataran tinggi. Kabupaten ini pada tahun 2005 berpenduduk 1.727.708 jiwa.

Pendapatan Kabupaten Brebes pada tahun 2004 sebesar Rp. 476.469.220.000 yang kemudian meningkat di tahun 2005 menjadi Rp. 530.027.593.000 atau berarti terjadi kenaikan sebesar 11,24 %. Dari pendapatan ini kontribusi terbesar diterima dari sektor pajak yang menyumbang 38,51 % kemudian retribusi daerah 37,61 %, penerimaan lain-lain 48,35 % dan laba BUMD 5,53 %.

Jumlah koperasi secara absolute di Kabupaten Brebes tercatat selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2003 tercatat 250 koperasi yang meningkat menjadi 262 unit koperasi di tahun 2004 yang berarti meningkat sebanyak 12 unit koperasi atau 4,8 %. Angka ini kemudian bertambah lagi pada 2005 menjadi 264 yaitu naik 2 unit koperasi atau 0,76 %. Setelah itu pada tahun 2006 kembali mengalami kenaikan sebanyak 15 unit koperasi menjadi 279 unit koperasi atau 5,68 %. Jumlah koperasi masih naik secara absolute hingga per Agustus 2007 yaitu sebanyak 295 unit koperasi atau naik sebanyak 16 unit.

Tabel 1 Jumlah Koperasi per Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 2003 – Agustus 2007

No	Kecamatan	2003	2004	2005	2006	Agustus 2007
1	Brebes	79	79	80	87	Tidak ada rincian per kecamatan
2	Wanasari	15	16	16	20	
3	Jatibarang	8	9	9	10	
4	Bulakamba	12	17	18	18	
5	Tanjung	7	7	7	7	
6	Losari	13	13	13	13	
7	Kersana	9	9	9	9	
8	Banjarharjo	11	11	11	11	
9	Ketanggungan	8	8	8	8	
10	Larangan	8	8	8	8	
11	Songgom	7	7	7	8	
12	Tonjong	13	13	13	13	
13	Bumiayu	25	26	26	26	
14	Sirampong	7	7	7	8	
15	Paguyangan	15	19	19	19	
16	Bantarkawung	7	7	7	8	
17	Salem	6	6	6	6	
		250	262	264	279	295

Sumber : diolah dari data sekunder Kantor Pemberdayaan Koperasi (PK) dan UKM Kabupaten Brebes

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2003 sampai tahun 2006 sebanyak 29 unit koperasi. Dari jumlah itu jumlah koperasi aktif hanya 160 unit atau hanya 57,38 % dan tahun 2007 kondisi per Agustus 2007 jumlah unit koperasi yang aktif meningkat tipis yaitu sebanyak 13 unit menjadi 173 unit dari total 295 koperasi atau berarti 58,64%. Persentase kenaikan unit koperasi aktif per Agustus 2006 ke Agustus 2007 sebesar 6,12%. Informasi ini menuntut agar Kantor Pemberdayaan Koperasi dan UKM mengaktifkan 41 % koperasi. Caranya bagaimana tergantung dari masalah koperasi yang ada. Hal ini perlu diidentifikasi dan dipecahkan masalahnya.

1. Profil 4 (empat) Koperasi Responden :

(1) Koperasi Serba Usaha (KSU) “ Tegar “, Bumiayu

Koperasi Serba Usaha Tegar ini beralamat di Jalan Kenangan No. 18 Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes,

kodepos 52273. Kondisi keuangan KSU Tegar pada tahun 2004 sampai dengan 2005 terlihat mengalami penurunan baik Harta Lancar Penyertaan, Harta Tetap, Hutang Lancar serta SHU berjalan yang dibagikan sedangkan Kekayaan Bersih mengalami kenaikan.

Harta Lancar KSU Tegar tahun 2004 berjumlah Rp. 112.726.547 dan tahun 2005 sebesar Rp. 106.818.147 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 5.908.400 atau senilai 5,24%. Untuk penyertaan tercatat tahun 2004 sebesar Rp. 124.467.780 dan tahun 2005 Rp. 124.467.780. Ini berarti penurunan sebesar Rp. 5.788.400 atau 4,44%. Kemudian Hutang Lancar pada tahun 2004 sebesar Rp. 58.267.948 kemudian tahun 2005 senilai Rp. 44.342.030 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 13.925.918 atau 23,89%. Kekayaan Bersih mengalami kenaikan dari tahun 2004 Rp. 59.897.307 dan tahun 2005 sebesar Rp. 68.949.461 berarti naik sebesar Rp. 9.052.154 atau 15,11%. SHU Berjalan mengalami penurunan dari tahun 2004 Rp. 12.090.925 dan tahun 2005 Rp. 11.176.289 yang berarti menurun Rp. 914.636 atau 7,56%

(2). **Koperasi Petani Pemakai Air “Dharma Tirta Sejahtera “**

Alamat dari Koperasi Petani Pemakai Air “Dharma Tirta Sejahtera” ini adalah Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Harta Lancar tahun 2005 adalah Rp. 117.857.901 dan tahun 2006 adalah Rp. 211.472.207 atau naik sebesar Rp. 95.614.306 atau 79,42%. Harta Tetap 2005 sebesar Rp. 49.112.202 dan di tahun 2006 tetap tanpa ada perubahan. Hutang Lancar tahun 2005 sebesar Rp. 94.189.847 dan naik secara signifikan di tahun 2006 karena ada dana bergulir PKPS-BBM menjadi Rp. 178.084.251 atau naik sebesar Rp. 83.894.404 atau 89,06%. Modal Sendiri tahun 2005 sebesar Rp. 61.108.972 dan tahun 2006 sebesar Rp. 80.475.275 berarti naik sebesar Rp. 19.366.303 atau 31,69%.

(3). **Koperasi “ Mayar “**

Koperasi Masyarakat Paguyangan Raya “ Mayar “ ini beralamat Jl. Raya Paguyangan No. 56, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Harta lancar tahun 2004 sebesar Rp. 39.210.000 dan menjadi Rp. 49.150.000 di tahun 2005 yang berarti meningkat sebesar Rp. 9.940.000 atau 25,35%. Hutang Lancar 2004 sebesar Rp. 13.665.000 dan tahun 2005 Rp. 27.826.000 atau naik Rp. 14.151.000 atau 103,69%. Modal sendiri dari Rp. 4.889.500 di tahun

2004 menjadi Rp. 70.233.500 di tahun 2005 atau naik Rp. 5.334.000 yang berarti 8,21%.

(4). Koperasi Unit Desa (KUD) “ Bhakti “

Koperasi Unit Desa Bhakti berdomisili di Jl. KH. Abdul Karangayu Tengguli, Tanjung-Kabupaten Brebes. KUD ini beranggotakan 147 orang pada tahun 2006 lalu. Adapun anggota yang dilayani meminjam dana PKPS BBM 2005 yang direalisasikan pada tahun 2006 sebanyak 38 orang. Harta lancar tahun 2005 Rp. 4.197.676.742,68 mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.127.190.431,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 7.048.6311,68. jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2005, modal sendiri tahun 2006 mengalami peningkatan dari Rp. 42.247.342,40 menjadi Rp. 46.236.734,40 atau naik Rp. 3.989.392.

2. Proses Pengajuan Bantuan

Proses pengajuan bantuan dana P3KUM yang berjalan di Kabupaten Brebes-Jawa Tengah berjalan lancar, sistematis, dan rapi. Kinerja dari Dinas Koperasi Brebes juga pantas dihargai. Mereka telah memiliki *data-base* yang terkomputerisasi. Sehingga, dalam proses penentuan koperasi mana yang berprestasi dan ber-*performance* baik, dapat dilacak dengan mudah. Laporan tiap bulan dari tiap koperasi juga diusahakan semaksimal mungkin masuk ke Dinas Koperasi.

Proses pengajuan bantuan diawali dari sosialisasi dari pihak Kementerian Negara Koperasi dan UKM kepada Dinas Koperasi di tingkat Kabupaten. Setelah itu, pihak kabupaten mensosialisasikan ke semua koperasi di wilayahnya dengan mengadakan penyuluhan. Setelah itu, masing-masing koperasi diminta membuat proposal yang isinya menjelaskan perkembangan koperasi masing-masing. Proposal, dikumpulkan untuk diverifikasi lebih lanjut ke tingkat kabupaten. Setelah itu, pihak kabupaten menyetorkan ke tingkat propinsi. Setelah itu, dikirim ke pusat. Di tingkat pusat, pihak Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan keputusan mana koperasi yang berhak menerima dana bantuan P3KUM. Pemberian dana langsung diberikan ke rekening koperasi bersangkutan, tidak melalui pemerintah daerah propinsi.

Kendala yang dihadapi oleh koperasi penerima bantuan adalah adanya proses yang berbelit-belit di pencairan dananya. Ada mekanisme yang tidak lancar di bank. Mulai dari bank awal yakni Bank Mandiri., kemudian diubah ke Bank Pembangunan Daerah. Hampir semua pengurus di ke-4 koperasi yang didatangi oleh peneliti mengatakan prosesnya

berbelit-belit karena seperti dioper sana-sini oleh pihak bank. Sementara itu, keluhan lain adalah adanya proses yang memakan uang yang tidak sedikit ketika proses pengiriman data ke pihak propinsi. Mereka banyak mengeluarkan ongkos untuk biaya transportasi dan akomodasi. Mereka ingin agar prosesnya pengajuan, pencairan dana, berlangsung di kabupaten masing-masing.

3. Kondisi Riel Proses Pncairan Pinjaman

Proses pengguliran dana di **Koperasi Tegar diawali** dengan informasi dari pengurus yang mengumumkan adanya bantuan dari pemerintah, jumlahnya Rp. 100 juta. Kemudian disampaikan bahwa anggota yang punya usaha, bisa mengajukan tambahan modal. Persyaratan utama untuk memperoleh pinjaman uang dengan maksimal Rp. 4 juta adalah adanya jaminan. Salah satu anggota yang diwawancarai peneliti (responden) menyatakan sebagai jaminan, ia menyerahkan fotokopi KTP dan Surat Pajak Rumah. Kemudian cara mencicil pinjaman dibagi dua oleh pengurus Koperasi Tegar, yaitu dengan cara program mingguan, dan program bulanan. Responden memilih mencicil dengan cara bulanan.

Ketika ditanya mengenai proses peminjaman uang di koperasi Tegar, responden mengungkapkan rasa senang. Menurutnya proses peminjaman uang di koperasinya itu sangat mudah, cepat, dan bunganya tergolong kecil. *“Menurut saya, proses peminjaman dana dari koperasi Tegar paling gampang dibandingkan yang lain, misalnya kelompok PKK, atau yang lain. Potongannya juga besar. Di koperasi lebih murah. Nah, kalau di sini, kalau kita bisa lunas, dan mau pinjam lagi, ya langsung bisa”*.

4. Dampak P3KUM Terhadap Anggota Setelah Menerima Bantuan

Kondisi riel sebelum dan sesudah menerima dana bantuan itu, responden merasakan ada perubahan di keluarganya. Ada peningkatan jumlah stok barang dan jenis baru. *“Misalnya, dulu warung saya cuma menjual barang kebutuhan primer. Tapi sekarang sudah bisa ada bohlam. Tidak hanya sembako saja. Ada juga paku dan alat bangunan kecil”* .

Responden kedua adalah pengrajin tempe anggota **Koperasi Mayar**, melalui pinjaman uang dari dana P3KUM bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Usahanya berkembang dengan bertambahnya omzet tiap harinya. Implikasinya, ia bisa memperbaiki rumahnya menjadi

semakin lebih baik. Ia kini memakai keramik di rumah, memakai PAM, mempunyai WC-sarana MCK yang tergolong bersih.

Responden ketiga, penjual gorengan yang juga anggota koperasi **Koperasi Dharma Tirta**, meminjam dana dari P3KUM untuk mengembangkan usaha gorengan yang memang telah terkenal sejak dulu. Gorengan buatan responden ketiga ini telah terkenal hingga ke luar daerah Paguyungan karena adanya resep khusus yang membuat gorengan itu begitu spesial. Yang terpenting bagi responden ketiga ini adalah bagaimana ia bisa lancar dalam membayar kredit utangnya dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pinjaman uang dari koperasi (dana P3KUM), membantu responden ketiga dalam mengembangkan usahanya. Minimal, ia bisa membeli stok terigu dan bahan pokok lainnya. Penghasilannya meningkat. Ia bisa makan, bisa nyandang (beli pakaian), bisa “setor” kredit, dan bisa menyekolahkan anak. Selain itu, ia juga bisa berobat ke rumah sakit. Bahkan anaknya pernah sebulan di rumah sakit. Ia mampu membiayainya. Responden ini meminjam Rp 4 juta dari Koperasi, semuanya digunakan untuk modal sawah, modal dagang, dan modal anak sekolah. Responden ini tidak mengerti detil keuntungannya. Yang terpenting kebutuhannya terpenuhi tanpa ada hambatan.

Responden keempat adalah pedagang anggota koperasi, Ia berdagang pakaian keliling di desanya. Ia berbelanja pakaian di pasar Jatinegara, Jakarta. Biasanya ia berkeliling dengan motor dari rumah ke rumah. Pembelian pakaian oleh warga itu biasa dilakukan dengan cara mencicil. Sebuah metode promosi dari responden ini agar masyarakat tidak merasa berat dengan membayar tunai. Responden berbelanja setiap dua bulan sekali ke pasar Jatinegara, dan tergantung kebutuhan. Responden menggunakan jasa bus untuk belanja ke Jakarta. Ia membeli pakaian yang sebanyak 5 kodi. Jika ditotal, sekali belanja semuanya ada 30 macam. Pemasukannya dari hasil jualan pakaian itu lumayan. Dari minimal 5 kodi itu, omset penjualan sebesar Rp 3 juta. Itu sudah mendapat 30 macam warna. Modal dari pinjaman dana P3KUM itu digunakannya untuk berbelanja pakaian lebih banyak lagi. Biasanya pakaian itu habis dalam 2 bulan. Sehingga, ia bisa menghemat ongkos pulang pergi ke Jakarta sehingga tidak terlalu sering karena volume belanja sudah lebih besar. Artinya dengan tambahan modal dari P3KUM Ia bisa menambah volume usaha. Implikasinya, stok barang yang akan dijajakan ke konsumen semakin banyak. Selain itu, ia juga memiliki usaha sampingan. Ia menjalani pertukangan sebagai tambahan pemasukan. Tapi hal itu hanya musiman. Biasanya menjelang lebaran saja banyak pesanan kusen pintu, dan sejenisnya. Semua usahanya itu modalnya bersumber dari dukungan adana P3KUM Koperasi Dharma Tirta.

Responden kelima menjadi peminjam uang dari koperasi Dharma Tirta. Ia berprofesi sebagai penadah teh dari kebun teh. Kemudian, teh tersebut ia bungkus sendiri dalam kemasan, dan dipasok ke warung-warung kecil di sekitar desanya. Ia meminjam dana P3KUM untuk bisa membeli teh lebih banyak lagi dan bisa memasok ke lebih banyak warung lagi (menambah pelanggan). Sehingga, keuntungannya bisa meningkat. Responden ini berkeliling sendiri dengan motor menjajakan teh kemasannya.

5. Manfaat P3KUM bagi Anggota Responden

Manfaat dari pinjaman dana P3KUM dari **Koperasi Tegar** benar-benar dirasakan oleh anggota koperasi tersebut. Dalam pengakuan Responden pertama, ia merasa beruntung karena dengan bisa membeli stok barang yang lebih banyak dari biasanya, ia bisa menghemat ongkos transportasi ke pasar. *“Dana yang dipinjam dari P3KUM itu dipakai untuk menambah stok barang. Hanya itu saja. Dulu kalau belum ada dana itu, saya harus belanja tiap dua hari sekali. Nah, itu butuh dana transport yang besar (Jarak- rumah ke pasar jauh). Tapi setelah menerima bantuan dana P3KUM itu, saya bisa menghemat biaya transport. Sekali belanja, bisa untuk nyetok barang untuk 5 hari sekali.”*

Keuntungan lain yang dirasakan Responden pertama adalah dengan adanya bantuan dari pemerintah, terutama dalam konteks ia meminjam uang dari koperasi. Momen yang paling ditunggunya adalah adanya RAT tiap tahun. Biasanya di acara Rapat Anggota Tahunan itu, ada acara makan bersama, dan diberi uang untuk ongkos pulang. Kumpul bersama. setiap tahun merupakan kebahagiaan tersendiri bagi anggota. Rutinnya itu sekitar bulan Pebruari. Selain itu, ketika membayar cicilan utang, Ia juga merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman anggota lainnya yang juga meminjam uang ke koperasi. Sehingga, pos koperasi menjadi tempat berbagi suka-duka berbagai jenis anggota koperas . Mereka berbagi resep, trik dagang, dan juga info tentang disana bisa mengambil harga barang murah. *“Suka lainnya, ketika bayaran cicilan kita bisa cerita dengan teman-teman lain. Siapa tahu muncul ide baru. Jadi, kita bisa belajar”*. Kondisi riel ini merupakan proses belajar bagi anggota selain berinteraksi lebih sering mereka mendapat informasi lain.

Hasil penjualan tempe buatan responden kedua, salah satu anggota pengrajin dan penjaja tempe yang diwawancarai oleh peneliti-memberikan keuntungan yang besar bagi perbaikan ekonomi keluarga responden ini terbukti, keluarganya bisa bertempat tinggal di rumah dengan ukuran 17x 8 m. Lantainya sudah pakai keramik, MCK/WC yang memadai. Ada

juga kolam kedelai untuk mendukung pasokan bahan dasar pembuatan tempe. Ia juga memakai PAM untuk penyediaan air. Singkatnya, responden kedua ini termasuk orang yang sukses meminjam uang dengan sistem mingguan awalnya, hingga sukses meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Responden para anggota Koperasi Dharma Tirta: yang diwawancarai oleh peneliti, didapatkan fakta bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya kredit dari pemerintah melalui dana P3KUM. Dan segi kesejahteraan dan kesehatan ada peningkatan di keluarga, Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Si anggota koperasi itu yang berprofesi sebagai penjual gorengan, mampu membiayai biaya perawatannya karena bisa mengambil dari tabungan hasil usaha gorengan yang berkembang akibat meminjam dari dana P3KUM.

6. Manfaat P3KUM Bagi Lingkungan Sekitar

Dengan adanya warung kelontong responden pertama, para tetangganya di lingkup RT bisa membeli kebutuhan keluarga setiap harinya. Dalam hubungan dengan tetangganya yang juga berlaku sebagai pelanggannya. responden ini menjalin relasi dengan baik, Ia dengan senang hati memberikan fasilitas “utang” kepada tetangga. Biasanya menurut responden ini, tetangga yang mengutang itu adalah perantauan. Jadi, ketika awal bulan, biasanya utang dibayar. Jika tidak dibayar, responden ini tidak memaksa untuk meminta segera dibayar. Ia membiarkan saja dan tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Baginya, menolong tetangga yang sedang kesusahan adalah suatu keharusan. Lagi pula, jika “mengeraskan” tindakan kepada para pengutang, ditakutkan pelanggan itu tidak mau lagi belanja di warungnya. Ia justru lebih berkonsentrasi untuk mencari pelanggan baru untuk meningkatkan pendapatannya. Utang tersebut tentunya masih tercatat di buku responden. Kebanyakan pengutang di warung responden adalah para perantau. Perantau di daerah Koperasi Tegar berprofesi sebagai petani, tukang jahit, atau di bidang jasa. Tapi kebanyakan sebagai tukang jahit. Mereka datang dari berbagai daerah, ada juga yang dari Jakarta. Menjadi pelanggan tetap di warung responden sebanyak 15 orang.

Koperasi Dharma Tirta mampu mengolah dan mengelola lingkungan alamnya. Hal ini ditandai dengan diperbaikinya saluran air agar lebih efektif dalam pengairan lahan pertanian. Dana perbaikan diambil dari 1 % yang langsung dipotong dan anggota ketika mengajukan kredit. Efektivitas pengairan itu membuah hasil panen tanaman yang luar biasa positif.

Jadi memang hasil SHU anggota tidak besar, tapi dialihkan kepada perbaikan infrastruktur pengairan. Jadi petani tidak merasa berat lagi dalam urunan membiayai biaya perbaikan saluran air. Karena sudah dibantu dari dana P3KUM. Dana P3KUM yang dipinjam masing-masing anggota itu dilakukan melalui mekanisme kredit. “Dampaknya jelas. Ketika dulu sebelum ada dana P3KUM, untuk memperbaiki jalan, saluran air. kita harus urunan dalam jumlah besar. Sekarang sudah ringan sekali. Anggota tidak terlalu terbebani lagi”, ujar ketua Koperasi Dharma Tirta itu.

7. Saran-Saran Dari Anggota Responden

Secara keseluruhan, ada beberapa saran dan masukan dari para anggota koperasi dan pengurusnya untuk pemerintah daerah dan pusat. Diantaranya:

(1) Anggota Koperasi Tegar

- Upaya peningkatan kinerja koperasi itu. Sehingga koperasi bertambah maju. Bahwa masyarakat di desanya banyak yang menganggur, khususnya anak muda. *“banyak sarjana yang menganggur. Juga banyak tukang jahit. Mereka sudah berpendidikan ada yang lulusan dari Semarang, Yogyakarta, Purwokerto. Sebernarnya mereka bisa dibimbing. Seandainya saja ada yang memberi modal serta diajarkan bagaimana memasarkannya. Artinya para sarjana dapat di arahkan untuk berkoperasi dan dibimbing”*.
- Perlu tambahan modal dari modal yang sekarang Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta untuk menambah biaya operasional pengolahan sawah
- *Seharusnya diberi kelonggaran bisa menaikkan jumlah pinjaman peraturan pembatasan itu yang mungkin perlu ditinjau ulang. Sama dengan BRI lah. Jadi, ada kendala secara administrasi. Sementara saya melihat di lapangan, ada anggota yang dikasih berapa pun, bisnisnya tetap lancar dan bisa bayar tepat waktu. Ini berarti kan dia butuh modal yang naik terus. Tapi untuk pertama kali dibatasi empat juta sebagai saringan, masalah. Tapi jangan dibatasi untuk langkah berikutnya,”* ujar ketua Koperasi Dharma Tirta.

(2) Koperasi Petani Pemakai Air Dharma Tirta Sejahtera

Rencana masa depan koperasi ini menambah ke usaha pola asuransi. “kita jadi bingung nantinya dengan adanya peraturan seperti itu (pembatasan) maksudnya, orang yang kreditnya dibatasi. Kalau pendanaan itu terbatas, kita susah karena harus memisahkan dana P3KUM dengan dana lain. Semakin banyak perputaran modal, maka semakin banyak penanganan terhadap saluran air pertanian, itu prinsipnya pak”, ucap ketua koperasi itu lagi.

3) KUD Bhakti :

- Para Pengurus ingin mendapatkan pendampingan dari pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Terutama mereka kesulitan dalam menghitung pembagian SHU. Sumber daya manusia di daerah mereka tidak mendukung untuk menghitung hal-hal matematis. Ia mengusulkan bagaimana jika pemerintah membuat program *software* yang bisa mudah digunakan untuk menghitung SHU dan sebagainya.
- Pendampingan diperlukan untuk meyakinkan masyarakat terutama anggota koperasi untuk lebih percaya kepada koperasi daripada kepada rentenir. Mekanisme yang cepat dari rentenir mampu memikat hati para anggota koperasi untuk beralih ke rentenir, daripada meminjam ke koperasi: sementara itu rentenir mematok harga atau bunga yang besar.
- Agar pemerintah mengembalikan peran KUD menjadi penyalur pupuk resmi. Hal ini disebabkan karena KUD Bhakti, khususnya anggota, merasa kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk tanaman

V. PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara antara peneliti dan responden sebagai anggota koperasi yang berprofesi sebagai pedagang kecil, terungkap bahwa responden sangat merasakan manfaat dana P3KUM untuk meningkatkan omset, menghemat ongkos/transportasi untuk membeli barang dagangan ke Jatinegara, membantu perawatan kesehatan bagi keluarga dan memperbaiki MCK di keluarga. Manfaat lain yang dirasakan antara lain adalah adanya keinginan untuk berkumpul pada saat RAT dan pada giliran membayar pinjaman untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk menambah ide-ide baru. Dalam proses ini sebetulnya terjadi proses belajar nonformal yang tidak disadari sebagai pembina. Artinya jika koperasi itu berfungsi secara baik di dalamnya ada sistem yang sudah berjalan secara otomatis untuk membangun keluarga sejahtera.

Sejahtera dalam hal ini adalah anggota dapat memenuhi kebutuhan nyata dalam kehidupan dan dapat berbagi rasa duka dan suka bagi orang lain.

Sungguh sangat sederhana, tapi itulah kehidupan riil anggota koperasi yang perlu diperhatikan. Tidak perlu berpikir terlalu luas karena anggota koperasi kita kebutuhannya sangat-sangat riil sebagaimana dijelaskan di atas. Keadaan ini perlu dijaga dan dipelihara dan diikuti untuk pembinaan lebih lanjut. Karena inilah embrio atau jalan menuju peningkatan kesejahteraan lebih lanjut.

Berkaitan dengan masalah dana bergulir yang belum jelas arahnya sampai saat ini perlu ditinjau untuk meneruskan apa yang sudah dilaksanakan sekarang sebagai pondasi yang kuat bagi pembinaan anggota koperasi lebih lanjut.

Untuk menjaga perkembangan dan pembinaan koperasi di kabupaten Brebes, perlu diperhatikan faktor kebijakan di sektor lain. Misalnya masalah perijinan untuk beroperasinya bank swasta, dengan unit USP di tingkat kecamatan, yang berpengaruh pada kinerja koperasi di daerah yang bersangkutan. Selain itu kebijakan perijinan untuk minimarket/supermarket juga berpengaruh pada pedagang-pedagang di pasar tradisional, yang juga adalah anggota koperasi/dibiayai dengan pinjaman dari koperasi. Keadaan ini berpengaruh pada omzet dan keuntungan, yang selanjutnya berakibat pada pelunasan/pembayaran cicilan ke koperasi,

Meski demikian, pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah dalam membina anggota koperasi masih perlu ditingkatkan lagi meski mereka telah mendapatkan uang dalam jumlah besar, namun jika tidak bisa mengelolanya, akan tidak bermanfaat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarganya. Perlu ada pelatihan manajemen utang. Perlu adanya pemisahan antara uang untuk usaha dan uang pribadi.

Koperasi di daerah ini, maupun daerah lainnya belum dapat menangkal pengaruh rentenir untuk para pedagang kecil di sejumlah pasar tradisional. Para rentenir sejenis ini masih beroperasi dengan leluasa. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak koperasi untuk mengurangi operasi para rentenir ini, namun koperasi-koperasi ini masih terperangkap pada terbatasnya modal yang dapat disalurkan kepada para pedagang kecil tersebut, mengingat jumlah mereka yang relative masih sangat banyak.

Ada gejala yang munculnya dengan koperasi dadakan di kabupaten Brebes, karena mudahnya membuat koperasi saat ini. Cukup datang ke notaris, koperasi pun bisa terbentuk. Munculnya koperasi kerap kali tidak didasari dari keinginan anggota untuk membentuknya, tapi muncul dari keinginan sekelompok orang yang oportunistis hanya ingin mendapatkan dana bantuan dalam jumlah

besar dengan jasa kecil. Kontroversi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan P3KUM : persepsi masyarakat terhadap dana bantuan P3KUM dari pemerintah atau dana dari Kementerian Koperasim dan UKM juga serupa statusnya dengan dana P3KUM. Sehingga banyak berasumsi sebagai dana hibah, dan tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

juga menjadi peminjam uang dari koperasi Dharmodalnya berasal dari sokongan dari kDari penjelasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dampak atau manfaat dana P3 KUM sangat dirasakan oleh anggota responden untuk meningkatkan omset, menghemat ongkos/transportasi, membantu perawatan kesehatan bagi keluarga dan memperbaiki MCK di keluarga .
2. Manfaat lain yang dirasakan anggota antara lain adanya rasa keinginan berkumpul pada saat RAT dan pada saat membayar pinjaman untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi untuk menambah ide-de baru.
3. Dalam proses berkoperasi meminjam dan membayar terjadi proses belajar nonformal bagi anggota koperasi Artinya jika Koperasi itu berfungsi secara baik di dalamnya ada sistem yang sudah berjalan secara otomatis untuk membangun kebersamaan
4. Koperasi dan anggota masih memerlukan kelanjutan dari program P3KUM untuk menambah modal dan manfaat-manfaat sebagaimana pada butir 1 dan 2
5. Koperasi dan anggota memerlukan pendampingan untuk mengelola keuangan. Terutama dalam menghitung pembagian SHU dan untuk meyakinkan masyarakat terutama anggota koperasi agar lebih percaya kepada koperasi daripada kepada rentenir. Karena mekanisme yang cepat dari rentenir mampu memikat hati para koperasi untuk beralih ke rentenir, daripada meminjam ke koperasi
6. P3KUM sangat dibutuhkan anggota koperasi, oleh sebab itu program ini perlu diteruskan untuk membantu anggota koperasi pengusaha kecil.
7. Program P3KUM hendaknya dibuat secara berkesinambungan dan konsisten agar dapat dirasakan anggota manfaatnya, terserah

sumberdananya darimana mengingat status dana perkuatan saat ini belum jelas keberadaannya tapi program ini perlu dilanjutkan

8. Agar pemerintah mengembalikan peran KUD menjadi penyalur pupuk resmi agar dapat melayani anggotanya

DAFTAR BACAAN

- Anonimus, (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Anonimus, (2005). *Rencana Tindak Jangka Menengah (RTJM) Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Agung Nur Fadjar, (2007). *Integrasi Program Pembangunan UKM*. Makalah seminar Isue- Isue Strategis Tanggal 20 Nopember 2007.
- BPS, (2006). *Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survei Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM*
- Hans-Dieter Evers, (1982). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Hasibuan Melayu, (1987). *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. CV Armico.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 09/Per/M.KUKM/VI/2006 *Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Tim Penulis Deputi Bidang Pengakajian Sumberdaya UKMK Kerjasama dengan PT Guntur Satria Perkasa, (2007). *Kajian Dampak Pemberdayaan Koperasi dan UKM bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta.